



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 13**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2004

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5712 S. UNIVERSITY AVE. CHICAGO, ILL. 60637

TEL: (773) 936-3700 FAX: (773) 936-3701

WWW.PHYSICS.DUKE.EDU

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

PHYSICS 101

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Ingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman and Vice-Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary and Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

1. Die ...
2. Die ...
3. Die ...

4. Die ...
5. Die ...
6. Die ...

7. Die ...
8. Die ...
9. Die ...

10. Die ...
11. Die ...
12. Die ...

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
main problems which are
confronting the Government.
2. The second part of the report
deals with the economic
situation and the
measures which are being
taken to improve it.

REPORT ON THE ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

MEMORANDUM

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT
FROM THE SECRETARY OF THE
ECONOMIC AFFAIRS
SUBJECT: THE ECONOMIC SITUATION
IN THE COUNTRY

1. The economic situation
in the country is
generally satisfactory.

2. The main problems which
are confronting the
Government are
the shortage of foreign
exchange and the
inflationary pressure.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa dan Kelurahan.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk di Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- c. Meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

1111

1111

1111

1111

1111

1111

BAB III
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan di bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.
- (2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah memberdayakan partisipasi dan

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE YEAR 1947

MEMORANDUM

The Board of Directors has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th day of January, 1948, in which you requested information regarding the financial condition of the Corporation for the year 1947. The Board has reviewed the financial statements for the year 1947 and is pleased to advise you that the Corporation has achieved a record of successful operations during the year. The financial statements for the year 1947 are attached hereto for your information. The Board is confident that the Corporation's financial condition is sound and that the Corporation is well positioned to meet its obligations and to continue its growth and development in the future.

RESOLUTION

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

ADOPTED

Resolved, that the Board of Directors hereby approves the financial statements for the year 1947, as presented to the Board, and that the same be and they are hereby approved and adopted as the true and correct financial statements of the Corporation for the year 1947. The Board further resolves that the financial statements be and they are hereby approved and adopted as the true and correct financial statements of the Corporation for the year 1947.

prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memberdayakan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat ;
- d. Menjadi mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mensukseskan program pemerintah ;
- e. Memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- f. Menggali dan memberdayakan potensi Desa dan Kelurahan dalam pembangunan ;
- g. Menjalin kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan untuk pembangunan ;

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1954. It discusses the author's interest in the subject and the reasons for writing the paper.

2. Introduction

The purpose of this paper is to investigate the relationship between the variables X and Y. The data used in this study were collected from a random sample of 100 subjects.

The first part of the study was a pilot study to determine the reliability of the measurement instrument. The results of this study are presented in Table 1.

The second part of the study was a main study to determine the relationship between X and Y. The results of this study are presented in Table 2.

The results of the pilot study and the main study are discussed in the following sections. The first section discusses the reliability of the measurement instrument.

The second section discusses the relationship between X and Y. The results of the main study are compared with the results of the pilot study.

The third section discusses the implications of the results of the study. The results suggest that there is a significant relationship between X and Y.

The fourth section discusses the limitations of the study. The results of the study are based on a random sample of 100 subjects, and it is possible that the results would be different if a larger sample had been used.

- h. Melaksanakan kegiatan lain yang membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan ;
- e. Anggota.

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota sesuai kesepakatan musyawarah.
- (2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. Objectives

The primary objective of this document is to provide a clear and concise overview of the organization's financial policies and procedures. It aims to ensure that all employees understand their responsibilities and the correct way to handle financial matters.

3. Scope

This document applies to all employees of the organization, regardless of their position or department. It covers all financial transactions, including income, expenses, and asset management.

The document is intended to serve as a guide for all financial activities and is subject to periodic review and updates as necessary.

It is the responsibility of all employees to read and understand this document and to adhere to its provisions.

Any questions or concerns regarding this document should be directed to the Finance Department.

This document is effective as of the date of its issuance.

It is the policy of the organization to maintain the confidentiality of all financial information.

Unauthorized disclosure of this information is strictly prohibited.

4. Policy

The organization's financial policy is based on the principles of honesty, integrity, and transparency. All financial transactions must be recorded accurately and promptly.

Employees are required to provide accurate and complete information regarding their financial activities. Any falsification or manipulation of records is considered a serious violation of company policy.

The organization reserves the right to investigate and take disciplinary action against any employee who violates these financial policies.

It is the responsibility of all employees to report any suspected financial irregularities to the appropriate authorities immediately.

This document is the property of the organization and should be kept in a secure location.

Unauthorized reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. sehat jasmani dan rohani ;
 - e. berkelakuan baik ;
 - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ;
 - g. dapat membaca dan menulis, berpendidikan serendah –rendahnya SLTP, atau SD dengan pengabdian selama 2 (dua) Tahun ;
 - h. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat ;
 - i. Batas usia serendah – rendahnya 21 Tahun.
- (3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a series of entries, though the specific details are completely unreadable.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

INSTITUTIONAL PLAN FOR THE YEAR 1960

Page 10

The following is a summary of the institutional plan for the year 1960. The plan is based on the assumption that the institution will continue to operate as a non-profit organization and will be subject to the same laws and regulations as in the previous year. The plan is divided into two main parts: the first part deals with the general objectives and the second part deals with the specific activities. The general objectives are to maintain and improve the quality of the institution's services, to expand its facilities, and to increase its financial resources. The specific activities are to be carried out in accordance with the following schedule:

1. General Administration: The general administration will continue to be responsible for the overall management of the institution. It will be required to submit a report to the board of directors at the end of the year. The report will include a summary of the institution's activities, a financial statement, and a statement of the institution's position. The general administration will also be responsible for the institution's public relations and for the maintenance of its records.

2. Financial Management: The financial management will be responsible for the institution's financial affairs. It will be required to submit a financial statement to the board of directors at the end of the year. The financial management will also be responsible for the institution's budgeting and for the collection of its funds. The financial management will also be responsible for the institution's investments and for the maintenance of its assets.

3. Educational Activities: The educational activities will be carried out in accordance with the institution's educational plan. The plan will be based on the institution's educational objectives and will be subject to the approval of the board of directors. The educational activities will include the provision of instruction, the supervision of students, and the maintenance of the institution's educational facilities. The educational activities will also include the institution's research and development activities.

4. Research and Development: The research and development activities will be carried out in accordance with the institution's research and development plan. The plan will be based on the institution's research and development objectives and will be subject to the approval of the board of directors. The research and development activities will include the institution's research and development projects, the institution's research and development facilities, and the institution's research and development personnel.

5. Public Relations: The public relations activities will be carried out in accordance with the institution's public relations plan. The plan will be based on the institution's public relations objectives and will be subject to the approval of the board of directors. The public relations activities will include the institution's public relations programs, the institution's public relations facilities, and the institution's public relations personnel.

6. Maintenance and Repairs: The maintenance and repairs activities will be carried out in accordance with the institution's maintenance and repairs plan. The plan will be based on the institution's maintenance and repairs objectives and will be subject to the approval of the board of directors. The maintenance and repairs activities will include the institution's maintenance and repairs projects, the institution's maintenance and repairs facilities, and the institution's maintenance and repairs personnel.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :

- a. iuran/swadaya masyarakat ;
- b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- c. bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.
- (2) Hasil musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku

RESEARCH REPORT
NO. 10

1965

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from 1963 to 1965. The data are presented in the form of a table, with the first column showing the year of the experiment, the second column showing the number of subjects, and the third column showing the mean score. The scores are given in parentheses.

RESEARCH REPORT
NO. 11

1966

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from 1964 to 1966. The data are presented in the form of a table, with the first column showing the year of the experiment, the second column showing the number of subjects, and the third column showing the mean score. The scores are given in parentheses.

1967

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from 1965 to 1967. The data are presented in the form of a table, with the first column showing the year of the experiment, the second column showing the number of subjects, and the third column showing the mean score. The scores are given in parentheses.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

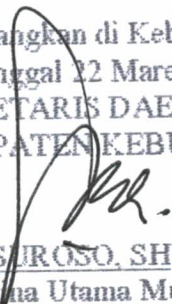
Ditetapkan di K e b u m e n
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H.S. IROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 15**

11/11/11

Dear Mr. [Name],

I am writing to you regarding the [Topic] that we discussed in our meeting on [Date]. I have reviewed the information you provided and I am pleased to hear that you are interested in [Topic].

I would like to discuss this further with you.

Please let me know if you have any questions.

Yours faithfully,

[Name]

[Title]

[Signature]

[Name]
[Title]
[Address]
[Phone Number]
[Email Address]

CONFIDENTIAL - NOT TO BE DISCLOSED TO THE PUBLIC

Page 1 of 1